

## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2019

PERDA KOTA MADIUN NO. 2 LD 2019 / NO. 1 SERI B, TLD NO 79, 21 HLM.

### PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**ABSTRAK** : Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan terhadap keselamatan masyarakat, keselamatan bangunan, keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor :19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor : 3/P/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Retribusi, Pemeriksaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Maret 2019

- Penjelasan : 4 hlm